

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN
(RASKIN) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

JHENIAR EVRILIANY AKMEL

NPM: 1451010061

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

JHENIAR EVRILIANY AKMEL

NPM. 1451010061

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing 1 : Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag

Pembimbing 2 : Yulistia Devi, S.E., M. S. Ak.,

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

ABSTRAK

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,00 per kg di titik distribusi. Bahwa praktik pendistribusian Raskin di Kecamatan Sukarame tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Permasalahan lain dari program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat waktu, belum tepat kualitas, belum tepat, dan belum tepat harga.

Rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas program beras miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame, serta bagaimana efektivitas program beras miskin (raskin) menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program beras miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame dan mengetahui bagaimana efektivitas program beras miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukarame dengan total penerimanya 1922 RTS-PM. Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumusan slovin dan metode pengambilan sampel menggunakan metode *probability sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendistribusian raskin berhasil apabila 6 indikator kebijakan penentu program raskin dapat terpenuhi dengan baik dan itu akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pendistribusian beras miskin di lapangan terdapat 4 indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga dan tepat waktu. Program raskin di Kecamatan Sukarame hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin. Implementasi program raskin di Kecamatan Sukarame dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (jaminan sosial) yaitu suatu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.

Kata Kunci : Efektivitas, Raskin, Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl Lef.kol H. Endro Suratmin Sukarame Telp: (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)**

Nama : **Jheniar Evriliany Akmel**
NPM : **1451010061**
Jurusan/Fakultas : **Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2018

Pembimbing I

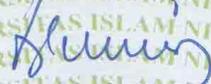

Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag
NIP. 19580824 1989031 003

Pembimbing II


Yulistia Devi, S. E., M.S.Ak
NIP. -

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah,


Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 19750424 200212 1 001

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl Let.kol H. EndroSuratmin Sukarame Telp: (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)** disusun oleh: **Jheniar Evriliany Akmel NPM: 1451010061** Jurusan: **Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 12 Oktober 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Drs. H. Nasrudin, M. Ag

(.....)

Sekretaris Sidang : Dedi Satriawan, M.Pd

(.....)

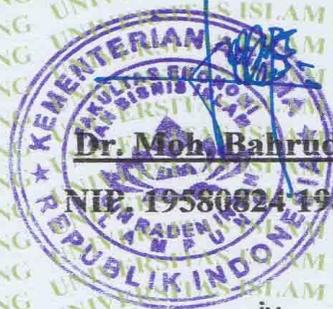
Penguji I : Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag

(.....)

Penguji II : Any Eliza, S. E., M. Ak.

(.....)

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag.

NID. 19580824 198903 1 003

MOTTO

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (QS. An-Nisa:8)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kaltim, 2012)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ini. Sebagai tanda bakti cinta yang tulusku persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku Mujiono, S. Ag dan Ibuku Muslikah Indriani yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti, memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Adik laki-lakiku Ade Nafian Akmal Khair Pasha yang selalu menjadi teman di rumah dan yang selalu aku sayangi dan cintai.
3. Teman-teman tersayang Ainun Lativah, Ana Septi Mutia, Arininoer Maliha, Dwi Wahyuningsih, Erma Oktaria, Indi Dwiastuti, Meli Kartika Sari, Miftakhul Khotimah, dan Riski Dwi Purnamasari yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat Ekonomi Syari'ah kelas A angkatan 2014 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala semangat dan dukungan serta do'anya selama ini.
5. Serta almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jheniar Evriliany Akmel, di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Januari 1996. Anak pertama dari dua bersaudara atas pasangan Mujiono, S. Ag dan Muslikah Indriani. Riwayat pendidikan penulis yang terselesaikan:

1. Pendidikan di SD Negeri 1 Harapan Jaya yang terselesaikan pada tahun 2008,
2. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2008 hingga 2011,
3. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2011 hingga 2014,
4. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari Ayahanda dan Ibunda, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Syari'ah pada tahun 2014

KATA PENGANTAR

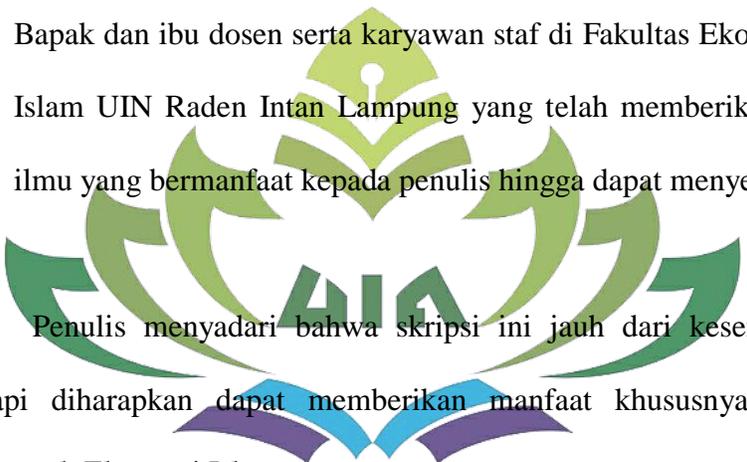
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Implementasi Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)*” dapat diselesaikan, shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E.) dalam bidang ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa

2. Madnasir, S.E, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag dan Yulistia Devi, S. E., M. S. Ak., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
4. Bapak dan ibu dosen serta karyawan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 1 September 2018

Penulis

Jheniar Evriliany Akmel

1451010061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas Program Raskin	23
1. Konsep Efektivitas.....	23
2. Ukuran Efektivitas	25
B. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	28
1. Program Beras untuk Masyarakat Miskin	28
2. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin	29

3. Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin).....	31
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	32
1. Kesejahteraan	32
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	34
3. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam.....	40
D. Konsep Distribusi	46
1. Distribusi	46
2. Konsep Distribusi Sistem Ekonomi Islam	48
E. Tinjauan Pustaka.....	49

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame	53
1. Letak Geografi/Luas Kecamatan	53
2. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan.....	55
B. Gambaran Umum Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame\	60
1. Sejarah Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame	60
2. Efektivitas Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame.....	64
3. Mekanisme Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin).....	65
4. Karakteristik Responden.....	66
5. Hasil Jawaban Kuisisioner (Angket) Efektivitas Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin).....	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame	77
B. Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame Perspektif Ekonomi Islam	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Sukarame Tahun 2010-2016	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penerima Raskin Kecamatan Sukarame Tahun 2010-2016.....	8
Tabel 1.3	Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016.....	15
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Masyarakat Kecamatan Sukarame Berdasarkan umur tahun 2016	59
Tabel 3.2	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Sukarame tahun 2016.....	61
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukarame tahun 2010-2016.....	62
Tabel 3.4	Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016.....	64
Tabel 3.5	Jawaban Responden Kusioner berdasarkan Usia	67
Tabel 3.6	Pekerjaan Rasponden.....	68
Tabel 3.7	Pendapatan Responden	68
Tabel 3.8	Program Raskin.....	69
Tabel 3.9	Program Raskin.....	70
Tabel 3.10	Program Raskin.....	70
Tabel 3.11	Program Raskin.....	71
Tabel 3.12	Ketetapan Jumlah Program Raskin.....	72
Tabel 3.13	Ketetapan Jumlah Program Raskin.....	72
Tabel 3.14	Ketetapan Sasaran Program Raskin	73
Tabel 3.15	Ketetapan Sasaran Program Raskin	73
Tabel 3.16	Ketetapan Waktu Program Raskin.....	74
Tabel 3.17	Ketetapan Harga Program Raskin.....	74
Tabel 3.18	Ketetapan Kualitas Program Raskin	75
Tabel 3.19	Ketetapan Administrasi Program Raskin.....	75
Tabel 3.20	Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat	76
Tabel 3.21	Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat	76
Tabel 3.22	Tingkat Pendidikan Masyarakat	77
Tabel 3.23	Tingkat Pendapatan Masyarakat	77
Tabel 3.24	Skala Perekonomian Masyarakat.....	78
Tabel 4.1	Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016	80
Tabel 4.2	Ketetapan Jumlah Program Raskin.....	81
Tabel 4.3	Ketetapan Jumlah Program Raskin.....	82
Tabel 4.4	Pendapatan Respinden.....	82
Tabel 4.5	Ketetapan Sasaran Program Raskin.....	83

Tabel 4.6	Ketepatan Sasaran Program Raskin\	83
Tabel 4.7	Ketepatan Waktu Program Raskin	84
Tabel 4.8	Ketepatan Harga Program Raskin	85
Tabel 4.9	Ketepatan Kualitas Program Raskin	86
Tabel 4.10	Ketepatan Administrasi Program raskin	87
Tabel 4.11	Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat	88
Tabel 4.12	Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat	88
Tabel 4.13	Tingkat Pendidikan Masyarakat	89
Tabel 4.14	Tingkat Pendapatan Masyarakat	89
Tabel 4.15	Skala Perekonomian Masyarakat	90



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dan Kuesioner
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Kuesioner
- Lampiran 4 : Nama Responden
- Lampiran 5 : Surat Balasan Pra Riset
- Lampiran 6 : SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Blanko Konsultasi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul ini adalah: “**Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam**” (Studi Kasus di Kecamatan Sukarame), dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Secara bahasa, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya sebab musabab dan duduk perkaranya.¹
2. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

¹ Biatna Dulbert Tampubolon “*Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan Sni 19-9001-2001*”. Jurnal Standardisasi Vol. 9 No. 3 Tahun 2007, h. 106

prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²

3. Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh perum BULOG untuk menjual beras dengan harga murah yang disubsidi.³
4. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik baiknya bagi dirinya, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.⁴
5. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.⁵

² Ibnu Sazmie Arief, "Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru" ,Jom Fisip Vol. 4 No. 2- Oktober 2017, h. 5

³ Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Mayarni, "Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat", Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, h. 59

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h. 309

⁵ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.15

6. Ekonomi Islam, Menurut Hasamuzzaman Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi sejalan dengan syari'ah. Ekonomi islam adalah ilmu tentang asas-asas memproduksi, mendistribusikan, dan memakai barang-barang serta kekayaan, sebagaimana yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Hadits.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu pelaksanaan atau penerapan program Beras Miskin (Raskin) yang di laksanakan di Kecamatan Sukarame.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dihadapi oleh Bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.52

Setelah diadakan observasi prasurvey pada Kecamatan Sukarame banyaknya rumah tangga miskin yang menerima raskin, tetapi tidak dapat memperbaiki perekonomiannya, sehingga terjadinya kesenjangan pada i program raskin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini, untuk mengetahui bagaimana alur atau efektivitas program raskin yang di laksanakan oleh pemerintah.

2. Alasan Subjektif

Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi program beras miskin (raskin), mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau sebuah keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal dirinya. Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga kemudian seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan.⁷ Agar Agama Islam tidak dinilai gagal

⁷ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010) h. 295

dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia bila Agama Islam tidak berhasil memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan yang timbul sebagai konsekuensi sistem ekonomi yang sedang berjalan atau dengan kata-kata lain yaitu kemiskinan struktural. Ketidakadilan tidak ada sangkutpautnya dengan kenyataan akan adanya orang miskin yang berjumlah besar dan orang kaya yang terbatas pada beberapa orang saja. Ketidakadilan terletak pada kecenderungan bahwa proses ekonomi yang menghasilkan tambahan kekayaan sosial itu hanya memungkinkan pengembangan diri golongan kaya dan tidak mengangkat golongan miskin.

Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat. Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar, dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka.

Sebagian orang memahami bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat dikatakan miskin yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000.⁸

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Dan Jumlah Penduduk Miskin
Kecamatan Sukarame Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Kemiskinan
2010	70,752	24,427
2011	71,530	23,530
2012	52,489	18,265
2013	54,765	19,789
2014	55,850	20,450
2015	56,921	21,232
2016	58,005	25,526
Junlah	420,312	153,219

Sumber: BPS Kecamatan Sukarame dalam Angka 2017⁹

Garis kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Sukarame pada tahun 2016 mencapai 25,526 orang dengan jumlah penduduk yang berjumlah 58,005 jiwa, dapat dilihat bahwa kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Sukarame pada

⁸ <https://bandarlampungkota.bps.go.id/> Diakses pada 28 Maret 2018

⁹ [https://bandarlampungkota.bps.go.id/Sukarame dalam Angka 2009-2017/](https://bandarlampungkota.bps.go.id/Sukarame%20dalam%20Angka%202009-2017/) Diakses pada 28 Januari 2018

tahun 2016 hampir mencapai 50% dari jumlah penduduk yang ada dan meningkat setiap tahunnya. Artinya belum adanya kesejahteraan untuk semua masyarakat Kecamatan Sukarame tersebut.

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab yaitu faqru yang menurut bahasa memiliki makna ihtiyaj (membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan faqir. Sedangkan menurut Istilah syara', faqir bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.¹⁰ Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat pIslam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi pdidalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi pkemiskinan yang mampu membuatnya lupaakan AllahSWT dan juga rasa psosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikan seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk kedzaliman seperti dzalim kepada Allah SWT, manusia, dan dzalim kepada dirinya sendiri.

¹⁰ Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Malang Press, 2011), h. 14.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٠﴾

Artinya : Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi: 70)

Kata miskin dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, atau orang yang dibuat diam oleh kefakiran serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kata miskin juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa dan ada juga yang berpendapat bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain definisi terminologis tersebut, para pakar agama juga berbeda pendapat dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Secara langsung, tidak ada informasi al-Qur'an maupun hadis dalam menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.¹¹

Banyak upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan program beras miskin (Raskin). Raskin adalah subsidi pangan

¹¹ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), h. 159.

dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Mekanisme pembagian Raskin dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke Kecamatan lalu disalurkan ke Kelurahan lalu disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.¹²

Pelaksanaan penyaluran Raskin melalui Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia, sementara pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dukungan yang diperlukan dari Pemerintah Daerah minimal pengalokasian biaya operasional melalui APBD untuk angkutan beras dari Titik Distribusi (TD) sampai ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Penyaluran Raskin (Beras untuk masyarakat

¹² <http://www.tnp2k.go.id/id>, "Beras Raskin", h.1, diakses 27 Januari 2018

miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Pada awalnya disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*Social Safety Net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.¹³ Kecamatan Sukarame merupakan bagian dari Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu sasaran penerima program Raskin.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Penerima Raskin
Kecamatan Sukarame Tahun 2010-2016

Tahun	Kemiskinan	Jumlah Penerima Raskin
2010	24,427	1.689
2011	23,530	1.732
2012	18,265	1.778
2013	19,789	1,890
2014	20,450	1.955
2015	21,232	2,150
2016	25,526	2,260
Jumlah	153,219	13,454

Sumber: Data diolah Kecamatan Sukarame 2017

¹³ <http://bulog.co.id/sekilas-raskin/>, h. 1 diakses tanggal 19 Januari 2018

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penerima raskin di kecamatan Sukarame kurang dari 10% dari jumlah penduduk miskin di kecamatan Sukarame. Kemiskinan di Kecamatan Sukarame cukup tinggi, dan masyarakat yang menerima raskin tidak ada 50% dari jumlah masyarakat miskin yang ada. Program raskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Bandar Lampung sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tetapi yang terjadi dilapangan berbeda, masih banyak terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan raskin tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena Raskin didistribusikan dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memenuhi pelayanan yang baik bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah dihadapkan pada tantangan sangat berat dan kompleks. Dalam berbagai tugas tanggung jawab yang di hadapinya, tantangan tersebut tidak bisa dihindari atau bahkan di abaikan melainkan perlu dihadapi dengan segera dan mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Agar masalahnya bisa cepat teratasi, sehingga setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan baik serta tuntas.

Masalahnya adalah bahwa praktik pendistribusian Raskin di Kecamatan Sukarame tidak sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Raskin yang telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Raskin dengan jumlah yang telah

ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga berkurang.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung’.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukarame?
2. Bagaimana Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame dalam perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis efektivitas program beras miskin (Raskin) dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Sukarame.

- b. Untuk menganalisis efektivitas program beras miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame menurut Perpektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan dalam kajian program Raskin dan sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang implementasinya.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada lembaga pemerintahan Kecamatan Sukarame, dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program Raskin.
- c. Mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penerapan program Raskin dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukarame.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaedar Alwasilah dalam bukunya yang mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati, memiliki kelebihan adalah adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.¹⁴

Menurut Restu dalam bukunya penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data asli.¹⁵ Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer yang digunakan yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Obyek penelitian ini adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

¹⁴ Nahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 37

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 129

Sukarame kota Bandar Lampung dan masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukarame.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal ataupun eksternal. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini yang didapat dari BPS dan kantor Kecamatan Sukarame.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi.¹⁶ Objek observasi ini adalah masyarakat penerima raskin, untuk melihat keadaan sebenarnya dari masyarakat penerima raskin, apakah sesuai data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

¹⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 73

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur, cara ini dipakai guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan.¹⁷

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.¹⁸ Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukarame perspektif Ekonomi Islam. Objek wawancara ini adalah pihak Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Masyarakat yang menerima Raskin.

¹⁷ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 21.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R/D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.

c. Kuesioner

Metode kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.¹⁹ Obyek kusioner ini adalah masyarakat penerima beras miskin (Raskin).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Berdasarkan hal ini bahwa dokumentasi dalam penelitian ini adalah data penerima program raskin di Kecamatan Sukarame dan nama penerima program raskin di Kecamatan Sukarame.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. Dalam konteks ini peneliti meneliti implementasi program beras miskin pada masyarakat Kecamatan Sukarame, jadi populasinya adalah seluruh masyarakat yang menerima raskin di Kecamatan Sukarame. Jumlah keseluruhan masyarakat penerima RASKIN yaitu:

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo setiady, *Op.Cit*, h.140

Tabel 1.3
Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN
di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Jumlah RTS penerima RASKIN (Jiwa)
1.	2010	1.689
2.	2011	1.732
3.	2012	1.778
4.	2013	1.890
5.	2014	1.955
6.	2015	2.150
7.	2016	2.260
	Jumlah rata-rata penerima Raskin	1922

Sumber: data diolah dari kantor Kecamatan Sukarame

Populasi dari penelitian ini rata-rata berjumlah 1922 RTS (rumah tangga sasaran) per tahun.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel, dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin:²⁰

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

n= Jumlah sampel minimal

N= Jumlah populasi keseluruhan

e²= presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (error sample 1-15%)

$$n = \frac{1922}{1 + (1922 \times 10\%)^2} = 95,2$$

Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 95 orang responden/Kepala Keluarga (KK). Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik Simple Random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel secara acak tanpa memperhatikan strata di dalam populasi.

²⁰ Tony Wijaya, *Op.Cit.* h. 29

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan analisa data menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.²¹ Metode deduktif ini digunakan dalam menganalisa data yang berbentuk angka dari hasil tes, yang nantinya dideskripsikan secara verbal. Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan menurut

²¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), Cet. Ke-2, h. 130

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.²² Data yang diperoleh dalam penelitian ini jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti contohnya memilah kritik-kritik yang tidak relevan dengan teori dan konsep yang memilah kritik-kritik yang tidak relevan dengan teori dan konsep yang diutarakan oleh informan dalam proses wawancara pada penelitian ini.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 338.

b. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data merupakan cara memaparkan hasil temuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu berupa grafik dan juga tabel. Data-data yang ada kemudian dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan kemudian disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui analisis teori dan juga konsep. Sehingga pada akhirnya kesimpulan muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, penyimpanan, metode analisis yang digunakan, dan kecakapan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Program Raskin

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektifitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.¹ Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi itu

¹ Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), h.31

dikatakan telah berjalan dengan efektif.² Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan program raskin diperlukan SDM yang handal, berpengalaman dan berpendidikan, karena SDM sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program raskin, dari pendataan RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat), sampai pada penyaluran raskin Dari TD (titik distribusi) ke TB (titik Bagi) dapat berjalan lancar dan efektif. Ada beberapa faktor kunci sebagai pendukung keberhasilan antara lain :

a. Transparansi

Prinsip transparansi dengan memberikan sosialisasi kepada warga penerima program raskin terkait arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stake holder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan program raskin mulai dari pendataan RTS-PM sampai dengan penyaluran raskin di TB (titik bagi).

² Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004), H. 294.

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat memberikan respon positif dalam antrian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun juga dapat menolak kebijakan.

c. Pengawasan

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang di anut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

2. **Ukuran Efektivitas**

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³ Ukuran efektivitas, sebagai berikut:⁴

³ *Ibid*, h. 294

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program Raskin, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen

⁴ Asfriqi Machfiro, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Kota Palu*, e-Jurnal Katalogis ISSN: 2302-2019, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015, h. 181

secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal dengan istilah prinsip-prinsip pengelolaan. Adapun Prinsip pengelolaan raskin yaitu , nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Keberpihakan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), raskin bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau,
- 2) Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- 3) Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program raskin mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- 4) Pengawasan, maknanya tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya.

⁵ Sudarsana, “Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, ISSN: 0215-9635 Vol 21. No. 2 Tahun 2009

5) Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

B. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)

1. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin (RTM).⁶

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat

⁶ <http://bulog.go.id/>, "Program Beras untuk Keluarga Miskin", h.4-6, diakses 19 januari 2018

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.⁷ Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik vertical (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang berkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin.⁸

2. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Dalam menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah:⁹

- a. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000,
- b. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal RP.1.500.000

⁷ <http://www.tnp2k.go.id/id>, "Beras Raskin", h.1, diakses 20 Januari 2018

⁸ <http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/> h. 1, diakses 20 Januari 2018

⁹ *Ibid*, h. 2, diakses 21 Januari 2018

- c. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
- d. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
- e. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang)
- f. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu
- g. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang
- h. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus, dsb,
- i. Sumber air sumur masih menimba atau manual
- j. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/ menggunakan listrik akan tapi masih menumpang

Selanjutnya, dalam mengukur tingkat kemiskinan di masyarakat, Indonesia (dalam hal ini BPS) menghitung pengeluaran minimal untuk mengonsumsi 2.100 kalori per orang per hari. BPS juga menghitung pengeluaran minimal untuk perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Tiap tahun angka ini selalu direvisi, disesuaikan dengan kenaikan harga. Pendekatan ini telah dilakukan BPS sejak 1970-an.

3. Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Sasaran program raskin tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kilogram per satu rumah tangga miskin per bulan. Indikator keberhasilan program raskin:¹⁰

- a. Tepat sasaran penerima manfaat , raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-I), dan di beri identitas (kartu raskin atau bentuk lain)
- b. Tepat jumlah jumlah beras, raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 sampai dengan 15 Kilogram RTM, perbulan sesuai dengan hasil musyawarah.
- c. Tepat harga, harga beras raskin adalah sebesar Rp. 1.600 per Kilogram netto di titik distribusi.
- d. Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat kualitas, kualitas beras yang dibagikan kepada rumah tangga miskin harus layak untuk dikonsumsi.
- f. Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

¹⁰ <http://www.tnp2k.go.id/id>, “Beras Raskin”, h. 2, diakses pada hari Jum’at, 27 April 2018 pukul 15.30 WIB

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah rasa tenang seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar *universal* menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.¹¹

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, “orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.”¹²

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk

¹¹ Garda Maeswara, *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*, (Jakarta : Narasi, 2009), h.246

¹² Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, *Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (Petunjuk Teksis Operasional)*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, h.5

memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu :¹³

- 1) Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

¹³ Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), h.111-112

- 2) Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- 3) Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- 4) Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakatl dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanyadiukur dengan indikator moneter menunjuk aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckkerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok yaitu:¹⁴

¹⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah keadaan bermotor dan konsumsi.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality Of Life Indeks (PQLI)* atau *Basic Need Approach*. *PQLI* merupakan upaya untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu negara. Nilai tersebut menggunakan rata-rata tiga statistik yaitu tingkat melek huruf dasar, kematian bayi, dan harapan hidupa pada usia satu tahun. Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat *PQLI* belum memuaskan karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangandan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan.

Untuk menyempurnakan *PQLI* yang belum dapat dijadikan indikator masyarakat, maka *United Nation Develoment Program (UNDP)* mengenalkan formula *Human Develoment Indeks (HDI)* atau juga disebut pula Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*) pada tahun 1990, *IPM* dapat

digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah merupakan daerah atau negara maju, berkembang, atau terbelakang atau juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel *India Amrrtya Send an Mahbub ul Had* seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh Gustav Rams dari Yale University dan Lord Megnad Desai dari *London School Of Economic*.¹⁵

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut;

- 1) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial, maupun agama;
- 2) Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarganya; dan
- 3) Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama masyarakat sekitar, beribadah khusyuk disamping terpenuhi kebutuhan pokok.

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan

¹⁵ *Ibid*, h. 150

memasukkan anak kejang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹⁶

a) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- (1) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
- (2) Sedang (Rp. 5.000.000)
- (3) Rendah (< Rp. 5.000.000)

b) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- (1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)
- (2) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- (3) Rendah (< Rp. 1.000.000)

c) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- (1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

¹⁶ http://www.bps.go.id/indikator_kesejahteraan_masyarakat/ diakses pada hari minggu tanggal 29 April 2018

(2) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

(3) Non Permaen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas.

c) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

(1) Lengkap

(2) Cukup

(3) Kurang

e) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:

(1) Bagus (< 25% sering sakit)

(2) Cukup (25% - 50% sering sakit)

(3) Kurang (> 50% sering sakit)

- f) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

(1) Mudah

(2) Cukup

(3) Sulit

- g) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

(1) Mudah

(2) Cukup

(3) Sulit

- h) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

(1) Mudah

(2) Cukup

(3) Sulit

BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu: keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga.

Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

3. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

a. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Al- Falah secara bahasa bermakna Zhafarah bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al-falah artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Istilah Falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan

akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Falah bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:¹⁷

- 1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.

¹⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) h. 63

2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

3) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan *vertical*, namun juga menempatkan hubungan *horizontal* ini secara seimbang.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial. Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*).¹⁸

¹⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*. Vol. 3 No. 2, Desember 2015, h. 95

a) Prioritas Utama

Ad-Dharuriyyat ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) didunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

b) Prioritas Kedua

Al-Hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk ,memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan lima tujuan syari'at. Syari'ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

c) Prioritas ketiga

Tahsinīyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syari'ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syariah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari dharuriyah dan hajiyah. Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-dharuriyah* yang menjadi prioritas garapan Islam yang menjaga kemaslahatan:¹⁹

- 1) Agama atau keimanan (*Ad-din*) merupakan memberikan cara pandangan terhadap dunia yang mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya; prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.
- 2) Jiwa (*An-nafs*) seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya.
- 3) Akal (*Al-aql*) kemampuan daya pikir, memahami dan menganalisis.

¹⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Op.Cit*, h. 66

- 4) Keturunan (*An-nasl*) kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau pengambilan anak angkat.
- 5) Kekayaan (*Al-mal*) merupakan sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan.

Jiwa, akal dan keturunan ditempatkan pada urutan selanjutnya karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang mencakup kebutuhannya fisik, moral dan psikologi (mental). Memelihara jiwa sebagai tujuan *syari'ah*, dalam sudut pandang ekonomi mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya. Menjaga keturunan merupakan hal utama setelah jiwa dan akal. Keberlangsungan hidup keturunan sebagai penerus generasi merupakan asset SDM untuk masa yang akan datang. Pengelolaan SDM yang baik, akan menjadikan manusia mampu menciptakan hal-hal yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas dimasyarakat. Perlindungan terhadap kekayaan pada urutan terakhir dari tujuan *syari'ah*, ini lebih dikarenakan kekayaan bukan merupakan unsure utama dalam mewujudkan kesejahteraan semua manusia secara adil.²⁰

²⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Op.Cit*, h. 67-68

D. Konsep Distribusi

1. Distribusi

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi. Dengan demikian, para ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidakcukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu.²¹

Sementara, bila dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, pendapat di atas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki: “persoalan ekonomi bukanlah

²¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj) oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 286.

kekurangan sumber daya alam (resources) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain'.²² Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana, Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.

Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (QS. at-Taubah [9]: 58)²³

²² Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah*, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001), Cet. Ke-5, h. 197

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar.

2. Konsep Distribusi Sistem Ekonomi Islam

a. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui keadilan Distribusi

Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bias jadi hal itu, berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.²⁴ Pembahasan tentang modal akan berkaitan dengan erat dengan bagaimana alokasi dana untuk membayar hasil bagi modal yang diperoleh dari shahibul mal. Hal ini sangat bersebrangan dengan sistem konvensional yang menyertakan perhitungan bunga bagi pinjaman modal. Tentunya hal ini sangatlah kontradiktif dengan system ekonomi Islam, yang melarang praktik riba.²⁵

Ketika berbicara tentang tenaga kerja, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan adalah bagaimana proses penggajian dan pengupahan tenaga kerja. Di beberapa kitab Hadist ada banyak sekali

²⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 139

²⁵ *Ibid*, h. 139

panduan tentang ketenagakerjaan. Inti dari aturan tersebut yaitu Islam sangat menghargai keringat yang keluar dari para pekerja dan juga kesejahteraan hidup para pekerja. Akan tetapi Islam juga mengharuskan para pekerja untuk bersungguh-sungguh disetiap pekerjaan mereka. Karena pekerja yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya selain mendapatkan kompensasi gaji dan jaminan kesejahteraan, mereka juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan, terakhir kaitan distribusi pendapatan dengan manajemen, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk system dan juga menajerial suatu perusahaan.²⁶

Baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar Islam, yaitu mensejahterakan pemeluknya dunia dan akhirat. Dan ini dapat terealisasikan jikalau kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin.²⁷

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal

Sudarsana dalam jurnalnya yang berjudul “Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia”

²⁶ *Ibid*, h. 139-140

²⁷ *Ibid*, h. 140

Kesimpulan jurnal tersebut menyebutkan bahwa Program Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh pemerintah, dinilai hanya akan menciptakan sindrom ketergantungan bagi masyarakat miskin. Program Raskin lebih cocok diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya, misalnya orang cacat dan jompo terlantar.

Pemerintah sebaiknya memberi bantuan kepada masyarakat miskin berupa program pemberdayaan masyarakat miskin, misalnya : (1) program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja / usaha melalui pendidikan dan latihan-latihan kerja; (2) perluasan jaringan usaha (*networking*); (3) informasi pasar; (4) bantuan modal kerja/usaha. Dengan program pemberdayaan masyarakat miskin ini, maka diharapkan mereka menjadi produktif.²⁸

Penelitian saya bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi subsidi beras untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sukarame, menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kusioner, dan dokumentasi.

2. Jurnal

Siti Ulparia Lubis, Tavi Supriana Dan Emalisa dalam jurnalnya yang berjudul “RESPON MASYARAKAT PENERIMA RASKIN TERHADAP

²⁸ Sudarsana, “*Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*”, Jurnal ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009

PROGRAM BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN)” Studi Kasus
: Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap rumah tangga sasaran untuk menganalisis bagaimana respon masyarakat terhadap program Raskin menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif sehingga nantinya penulis dapat mendeskripsikan informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian, dimana pengelolaan data dilakukan dengan manual, data dikumpulkan dari hasil kuisionerdengan wawancara. Setelah dianalisis secara kualitatif respon masyarakat terhadap program beras untuk keluarga miskin, pada bagian ini variabel yang sama akan dianalisis secara kuantitatif melalui pemberian skor dengan menggunakan skala Likert.²⁹ Sedangkan penelitian saya untuk menganalisis bagaimana implementasi subsidi beras untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sukarame, menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kusioner, dan dokumentasi.

3. Jurnal

Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto dalam jurnalnya yang berjudul
“Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam

²⁹ Siti Ulparia Lubis, Tavi Supriana Dan Emalisa, “*Respon Masyarakat Penerima Raskin Terhadap Program Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) Studi Kasus : Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan*”, Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)”

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil batasan atau fokus penelitian yaitu Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah program raskin yang ada sudah terlaksana dengan baik atau tidak.³⁰

Sedangkan penelitian saya untuk menganalisis bagaimana implementasi subsidi beras untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sukarame, menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kusioner, dan dokumentasi.

³⁰ Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, “Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame

1. Letak Geografi / Luas Kecamatan

Kecamatan Sukarame adalah merupakan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung, yang terletak di ujung timur Kota Bandar Lampung. Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Sukarame memiliki batas-batas sebagai berikut:³¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kedamaian.

Luas wilayah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan peta administratif kelurahan tersebut adalah 493 Ha (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Hektar), namun luas tersebut tidak hanya digunakan oleh penduduk sebagai pemukiman, tetapi juga memiliki potensi Sumber Daya Alam. Hal ini dapat dilihat pada data bagian lahan berdasarkan penggunaannya, yaitu :

³¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Sukarame dalam Angka 2017*, (Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung, 2017), h. 5

- 1) Ladang : 30 Ha
- 2) Pemukiman : 458,4 Ha

Berdasarkan data di atas, terdapat sebanyak 30 Ha luas Kelurahan Sukarame digunakan sebagai lahan perladangan. Minimnya lahan yang dipergunakan warga sebagai lahan perladangan tersebut, karena sebagian besar warga yang berdomisili di Wilayah Sukarame merupakan pegawai pemerintahan serta pekerja sektor swasta. Namun pada umumnya luas lahan perladangan tersebut, sebagian besar dipergunakan masyarakat sebagai lahan pertanian dengan komoditas alam seperti padi, sayur mayur, serta buah-buahan.

Berikut adalah data penggunaan luas lahan sebagai pertanian berdasarkan komoditas alam di Wilayah Kelurahan Sukarame :

- 1) Kacang Panjang : 0,5 Ha
- 2) Padi : 15 Ha
- 3) Cabe : 0,5 Ha
- 4) Pisang : 0,5 Ha

Secara geografis letak wilayah Sukarame ini adalah wilayah pinggiran Kota Bandar Lampung, oleh sebab itu wilayah ini masih tergolong dalam kategori desa. Dikarenakan sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan disekitar sebagai lahan pertanian, dengan potensi komoditas padi 15 Ha (Lima Belas Hektar). Namun meskipun wilayah ini tergolong kategori desa, tetapi sebenarnya jarak antara Sukarame dengan

Pusat Kota hanya berjarak 2 Km (Dua Kilometer) dengan jarak tempuh waktu secara normal adalah lima belas menit perjalanan. Oleh karena itu, mobilitas di wilayah ini sangat tinggi khususnya mobilitas masyarakat ke pusat kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, wilayah Kecamatan Sukarame dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu:³² Sukarame, Sukarame Baru, Way Dadi, Way Dadi Baru, Korpri Jaya, Korpri Raya. Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Sukarame berada di Kelurahan Sukarame.

2. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan

Kecamatan Sukarame terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Jawa, Sunda, Lampung, Batak, Padang, dan masih ada yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak di bidang pertanian, disamping pertanian atau bercocok tanam sangat potensial juga di bidang peternakan, perdagangan dan industri kecil atau industri rumah tangga. Tentang sumber daya manusia di Kecamatan Sukarame ini pada umumnya masyarakat telah maju di bidang pendidikan.³³

a. Arah Kebijakan Pengembangan

Dalam rangka untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi yang berkelanjutan dengan proses pemberdayaan

³²*Ibid*, h. 6

³³*Ibid*, h. 6

masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perekonomian rakyat ini akan memberikan suatu kerangka upaya pemanfaatan potensi wilayah kecamatan yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronasi kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

b. Topografi

Secara keseluruhan Kecamatan Sukarame terdiri dari dataran rendah dan sedikit berbukit, dibagian dataran rendah tanahnya tersusun dari lapisan tanah keabu-abuan dan tanah liat berwarna merah, sedangkan dibagian dataran berbukit terdiri dari lapisan batu putih. Beberapa gunung yang berada di Kecamatan Sukarame diantaranya Gunung Sulah, Gunung Langgar dan gunung Kancil. Pada umumnya gunung-gunung tersebut tidak produktif dan telah diolah menjadi kawasan pemukiman penduduk melalui dukungan KPR-BTN baik tipe RS maupun RSS. Letak Sungai sungai dalam wilayah Kecamatan Sukarame pada umumnya mengalir dari Utara ke Selatan karena di sebelah Utara lebih tinggi dari bagian Selatan, sungai sungai tersebut diantaranya adalah Way Balau, Way Cirebon dan Way Halim.

c. Penduduk

Populasi penduduk yang mencapai 58.005 jiwa membuat wilayah ini termasuk ke dalam wilayah yang padat penduduk, sebab perbandingan jumlah penduduk yang berjumlah 58.005 orang dengan luas wilayah 14,75 Ha menempatkan wilayah ini sebagai wilayah yang padat penduduk cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:³⁴

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Masyarakat Kecamatan Sukarame
Berdasarkan Umur Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 tahun	2529	2440	4969
5-9 tahun	2810	2582	5392
10-14 tahun	2393	2286	4659
15-19 tahun	2824	3310	6134
20-24 tahun	3056	3263	6319
25-29 tahun	2527	2527	5054
30-34 tahun	2138	2281	4419
35-39 tahun	2270	2400	4670
40-44 tahun	2344	2297	4641
45-49 tahun	1931	2000	3931
50-54 tahun	1831	1527	3358
55-59 tahun	1098	841	1939
60-64 tahun	588	470	1058
65+ tahun	699	763	1462
Jumlah	29,018	2,897	58,005

Sumber: Arsip Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

³⁴ *Ibid*, h. 10

Tingginya angka golongan umur nol sampai empat tahun menggambarkan bahwa angka kelahiran di wilayah ini cukup tinggi, hal ini dapat menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk di wilayah Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung secara signifikan. Sedangkan penduduk pada golongan usia muda yaitu 15-24 tahun, jumlahnya dapat bertambah setiap periode enam bulan sekali. Hal ini dikarenakan di Wilayah Kecamatan Sukarame terdapat beberapa rumah kontrakan, mayoritas penghuninya adalah mahasiswa/I yang menetap sementara untuk kuliah.

d. Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Dan proses itu berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan.

Selain itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. Pendidikan merupakan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian.

Tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting pula dalam menggambarkan dan mengukur kepatuhan hukum masyarakat. Maka dalam hal ini akan dilihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Sukarame. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:³⁵

Tabel 3.2
Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kecamatan Sukarame Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Jumlah/Unit	Jumlah/Jiwa
SD/MI	17	3085
SMP/MTS	13	3076
SMA/MA	6	2982
SMK	5	2154

Sumber: Data diolah oleh Kecamatan Sukarame

Sarana dan prasarana pendidikan di atas, sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sukarame, yaitu tingkat SD (Sekolah Dasar) sederajat berjumlah 17 unit, tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) sederajat berjumlah 13 unit, tingkat SLTA (Sekolah Menengah Atas) sederajat berjumlah 6 unit, dan SMK berjumlah 5 unit.

³⁵ *Ibid*, h. 17-18

Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Sukarame, maka sarana dan prasarana ini sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam menikmati pendidikan. Akan tetapi, fakta sarana pendidikan yang ada belummampu secara optimal menciptakan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Kondisi demikian, disebabkan belum mendukungnya sistem pendidikan yang digunakan.

B. Gambaran Umum Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame

1. Sejarah Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau struktural. Berikut ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin di Kecamatan Sukarame dari tahun 2010-2016, yaitu:

Tabel 3.3
Jumlah penduduk Kecamatan Sukarame Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Kemiskinan
2010	70,752	24,427
2011	71,530	23,530
2012	52,489	18,265
2013	54,765	19,789
2014	55,850	20,450
2015	56,921	21,232
2016	58,005	25,526
Junlah	420,312	153,219

Sumber: Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sukarame meningkat dari tahun 2010 sebesar 24,427 dan di tahun 2016 mengalami peningkatan yakni sebesar 25,526. Oleh sebab itu, keefektifan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk program berasuntuk masyarakat miskin (raskin).

Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame berlangsung sejak tahun 2002. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban

pengeluaran RTM.³⁶ Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM).

Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma-cuma. Penerima bantuan Raskin harus membayar dengan harga Rp.1.600 per kg netto di titik Distribusi. Sehingga selisih antara harga pasar yang seharusnya dibayar dengan harga yang sesungguhnya dibayar (Rp.1.600,/kg) oleh keluarga miskin menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya.³⁷ Berikut ini adalah jumlah penerima manfaat beras untuk rumah tangga miskin (raskin) masyarakat Kecamatan Sukarame, yaitu:

³⁶ Sudarni, Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame, tahun 2018

³⁷ Sudarni, Hasil wawancara dengan Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame, 23 Mei 2018

Tabel 3.4
Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN
di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Jumlah RTS penerima RASKIN (Jiwa)
1.	2010	1.689
2.	2011	1.732
3.	2012	1.778
4.	2013	1.890
5.	2014	1.955
6.	2015	2.150
7.	2016	2.260
	Jumlah rata-rata penerima Raskin	1922

Sumber: Data Diolah Dari Kantor Kecamatan Sukarame

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah RTS penerima manfaat beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame dari tahun 2010 sebesar 1.689 RTS dan ditahun 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.260 RTS. Oleh sebab itu, keefektivan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi *kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian.

2. Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame

Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukarame sudah berlangsung sejak tahun 2002, dimana program raskin merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame, bahwa seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarame ini telah menerima bantuan program raskin. Proses pendistribusian raskin hanya dilakukan sampai titik kelurahan saja yang menerima bantuan, dan untuk proses penyerahan raskin sampai kepada RTS-PM dilakukan oleh pihak pelaksana di kelurahan.³⁸

Raskin di Kecamatan Sukarame ini belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan bantuan raskin, juga sebaliknya masyarakat yang sudah dikatakan mampu masih menerima bantuan raskin, dan di Kecamatan Sukarame banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya raskin bagi masyarakat miskin. Adanya kurang ketepatan pemberian raskin karena masih banyak masyarakat yang enuntut apabila tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa, dan juga berdasarkan hasil

³⁸ Sudarni, Hasil wawancara dengan kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame, 23 Mei 2018

observasi langsung masih adanya pilih kasih yang diberikan di sebagian Kelurahan di Kecamatan Sukarame sehingga Aparat lebih mengedepankan keluarganya dahulu yang menerima bantuan raskin dibandingkan dengan warga lain meskipun sudah dinyatakan keluarga mampu.

Dan juga dapat dilihat dari kualitas beras raskin itu sendiri masih banyak yang belum bisa dikatakan layak konsumsi bukan berarti tidak dapat dikonsumsi. Sedangkan raskin itu sendiri bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran keluarga.³⁹

3. Mekanisme Penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Adapun alur dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA)
- b. Beras raskin disalurkan oleh perum Bulog ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum Bulog dan pemerintah Kota/Kabupaten
- c. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras raskin kepada para RTS-PM dan masyarakat umum dapat

³⁹ Darti, Hasil wawancara warga Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, 13 Juni 2018

⁴⁰ Pedoman Umum (Pedum) Raskin tahun 2015, h. 34

mengetahui rumah tangga mana saja di desa/kelurahan tersebut yang berhak menerima raskin.

4. Karakteristik Responden

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu dimulai dari usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan utama, jumlah anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Sukarame dengan jumlah responden sebanyak 95 orang/KK.

a) Usia Reponden

Tabel 3.5
Jawaban Responden Kuisioner Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	< 20	-	-
2	21-30	20	21,05%
3	31-40	30	31,58%
4	> 40	45	47,37%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer diolah 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 20 orang atau 21,05%, sedangkan responden yang berusia diantara 31-40 tahun

berjumlah 30 orang atau sebesar 31,58%, dan responden yang berusia anantara lebih dari 41 tahun berjumlah 45 orang atau sebesar 47,37%.

b) Berdasarkan Pekerjaan Responden

Tabel 3.6
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Buruh	30	31,59%
2	Petani	15	15,79%
3	Serabutan	25	26,31%
4	Usaha Sendiri	25	26,31%
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer diolah 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 30 orang atau 31,59%, sedangkan untuk jumlah responden yang bekerja sebagai petani sebesar 15 orang atau 15,79%, sedangkan pada jumlah pekerjaan responden serabutan sebesar 25 orang atau 26,31%, jumlah responden yang mempunyai usaha sendiri sebanyak 25 orang atau sebesar 26,31%.

c) Berdasarkan Pendapatan Responden

Tabel 3.7
Pendapatan Responden

No	Pendapatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	< Rp. 500.000	35	36,84 %
2	Rp. 500.000 - Rp. 1. 000.000	55	57,90 %
3	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	5	5,26 %
4	> Rp. 2. 000.000	-	-
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500.000 sebesar 35 orang atau 36,84%, sedangkan untuk jumlah responden yang berpenghasilan Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 sebesar 55 orang atau 57,90%, sedangkan pada jumlah responden yang berpenghasilan Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000 sebesar 5 orang atau 5,26%, dan tidak ada responden yang berpenghasilan > Rp. 2.000.000.

5. Hasil Jawaban Kuisiner (angket) Implementasi Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Sukarame

Untuk memperoleh data tentang implementansi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukarame diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 17 butir soal pertanyaan untuk 95 sampel. Berdasarkansebaran angket dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari Kecamatan/kelurahan mengenai program raskin ini?	80	15
Persentase %	84,21%	15,79%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, angket warga mengenai Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari Kecamatan/Kelurahan mengenai program raskin, yang menjawab iya berjumlah 80 orang atau 84,21% dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 15 orang atau sebesar 15,79%.

Tabel 3.9
Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang didistribusikan oleh Pemerintah bermanfaat untuk keluarga anda?	85	10
Persentase %	89,47%	10,53%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil angket warga mengenai Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disubsidikan oleh pemerintah bermanfaat bagi keluarga anda, yang menjawab iya berjumlah 85

orang atau 89,47% dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 10 orang atau sebesar 10,53%.

Tabel 3.10
Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah beras untuk masyarakat miskin dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga anda? Terutama pada beban pangan pokok	45	50
Persentase %	47,37%	52,63%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil angket warga mengenai Apakah beras untuk masyarakat miskin dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, Terutama pada beban pangan pokok, yang menjawab iya berjumlah 45 orang atau 47,37% dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 50 orang atau sebesar 52,63%.

Tabel 3.11
Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah beras untuk masyarakat miskin yang didistribusikan pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda?	45	50
Persentase %	47,37%	52,63%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, angket warga mengenai Apakah beras untuk masyarakat miskin yang didistribusikan pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang menjawab iya berjumlah 45 orang atau 47,37% dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 50 orang atau sebesar 52,63%.

Tabel 3.12
Ketetapan Jumlah Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari Kecamatan atau Kelurahan mengenai jumlah beras, serta berapa kali jumlah pembagian Raskin dalam 1 tahun?	70	25
Persentase %	73,68%	26,32%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga sasaran yang menjawab iya berjumlah 70 orang atau sebesar 73,68% dan yang menjawab tidak berjumlah 25 orang atau 26,32%.

Tabel 3.13
Ketetapan Jumlah Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga anda selalu menerima beras miskin (Raskin) sebesar 10-15kg?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh rumah tangga sasaran yang menjawab iya atau sebesar 100%.

Tabel 3.14
Ketetapan Sasaran Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga Bapak/Ibu memiliki lahan pertanian?	25	70
Persentase %	26,32%	73,62%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran yang menjawab iya berjumlah 25 orang atau 26,32%, dan yang menjawab tidak berjumlah 70 orang atau sebesar 73,62%.

Tabel 3.15
Ketetapan Sasaran Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah rumah bapak/Ibu minimal berlantaikan semen?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh Rumah Tangga Sasaran menjawab iya.

Tabel 3.16
Ketetapan Waktu Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah anda menerima raskin sesuai dengan jadwal?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa tidak ada responden yang menjawab iya dan yang menjawab tidak adalah seluruh responden atau sebesar 100%.

Tabel 3.17
Ketetapan Harga Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah anda membeli beras miskin (raskin) dengan harga Rp. 1.600/kg setiap bulannya?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel menunjukkan bahwa seluruh atau 100% rumah tangga sasaran tidak membeli beras raskin dengan harga Rp. 1.600/kg.

Tabel 3.18
Ketetapan Kualitas Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah menurut anda kualitas beras miskin (raskin) layak untuk dikonsumsi?	30	65
Persentase %	31,58%	68,42%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Dari tabel diatas rumah tangga penerima manfaat beras raskin yang menjawab iya terdapat 30 orang atau sebesar 31,58% dan yang menjawab tidak berjumlah 65 orang atau sebesar 68,42%. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat 68,42% masyarakat mengatakan beras raskin tidak layak konsumsi.

Tabel 3.19
Ketetapan Administrasi Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima raskin?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 responden atau 100% yang menjawab tidak.

Tabel 3.20
Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga anda minimal makan 2kali sehari?	95	0
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 responden atau 100% responden menjawab iya dan tidak ada responden yang menjawab tidak.

Tabel 3.21
Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah dalam waktu seminggu dua kali keluarga anda mengkonsumsi ikan?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa seluruh reponden atau 100% responden yang menjawab iya.

Tabel 3.22
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah jenjang pendidikan keluarga anda minimal SMP?	70	25
Persentase %	73,68%	26,32%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 70 reponden atau 73,68% responden yang menjawab iya dan 25 responden atau 26,32% responden yang menjawab tidak.

Tabel 3.23
Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan tetap?	60	35
Persentase %	63,16%	36,84%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 60 reponden atau 63,16% responden yang menjawab iya dan 35 responden atau 36,84% responden yang menjawab tidak.

Tabel 3.24
Skala Perekonomian Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah ada pilihan bagi anda untuk pekerjaan yang lebih baik dalam menunjang perekonomian keluarga?	35	60
Persentase %	36,84%	63,16%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa *35 reponden atau 36,84% responden yang menjawab iya dan 60 responden atau 63,16% responden yang menjawab tidak.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Efektivitas Program Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame

Efektif merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran atau sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi atau pemerintah dalam mencapai tujuannya. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program raskin dikatakan efektif apabila memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan Program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T:

1. Tepat jumlah adalah beras raskin yang diberikan sejumlah 15 Kilogram untuk setiap Kepala Keluarga dalam perbulan.
2. Tepat sasaran adalah raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas.
3. Tepat waktu adalah pembagian beras raskin dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Tepat harga adalah harga beras raskin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.1.600/KG.

5. Tepat Kualitas adalah kualitas beras raskin layak untuk dikonsumsi.
6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Dari data yang berhasil dihimpun penulis diketahui bahwa di Kecamatan Sukarame menerima bantuan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Berikut data penerima raskin dalam kurun waktu 7 tahun:

Tabel 4.1
Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN
di Kecamatan Sukarame dari Tahun 2010-2016

No.	Tahun	Jumlah RTS penerima RASKIN (Jiwa)
1.	2010	1.689
2.	2011	1.732
3.	2012	1.778
4.	2013	1.890
5.	2014	1.955
6.	2015	2.150
7.	2016	2.260
	Jumlah rata-rata penerima Raskin	1922

Sumber: Data Diolah Dari Kantor Kecamatan Sukarame
 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima raskin di

Kecamatan Sukarame dari tahun 2010-2016 selalu mengalami peningkatan,

sedangkan tujuan suatu program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan masyarakat miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak. Dalam hal ini bahwa untuk tercapainya kesuksesan suatu program raskin di suatu Daerah atau Kecamatan, harus memenuhi seluruh indikator 6T ketepatan raskin, berdasarkan data pada lapangan bahwa diperoleh data sebagai berikut:

- a. Tepat Jumlah adalah jumlah beras raskin yang diberikan adalah sebesar 10-15 KG untuk setiap Kepala Keluarga

Tabel 4.2
Ketetapan Jumlah Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari Kecamatan atau Kelurahan mengenai jumlah beras, serta berapa kali jumlah pembagian Raskin dalam 1 tahun?	70	25
Persentase %	73,68%	26,32%

Sumber: Data Kusioner di olah 2018

Berdasarkan hasil kusioner di lapangan menunjukkan bahwa 70 RTS mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai berapa kali jumlah raskin yang dibagikan setiap tahun. Yang artinya pihak kecamatan telah memberitahukan informasi tentang raskin ini kepada masyarakat yang menerima program raskin

Tabel 4.3
Ketetapan Jumlah Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga anda selalu menerima beras miskin (Raskin) sebesar 10-15kg?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, bahwa 95 RTS atau 100% menjawab bahwa jumlah raskin yang mereka terima sebesar 10-15 KG. sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah raskin yang dibagikan ke pihak RTS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan kondisi di atas bahwa indikator tepat jumlah pada raskin di Kecamatan Sukarame dikatakan terlaksana dengan baik karna jumlah raskin yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketetapan pemerintah yaitu 15Kg/bulan/KK.

- b. Tepat sasaran adalah Program raskin diberikan secara tepat

Tabel 4.4
Pendapatan Responden

No	Pendapatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	< Rp. 500.000	35	36,84 %
2	Rp. 500.000 - Rp. 1. 000.000	55	57,90 %
3	Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000	5	5,26 %
4	> Rp. 2. 000.000	-	-
Jumlah		95	100%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2018

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima raskin sebesar 57,90% setiap bulannya berpenghasilan tidak kurang dari Rp.500.000, hal ini membuktikan bahwa masyarakat penerima beras miskin (raskin) sebagian besar adalah masyarakat yang keadaan ekonominya sudah dikatakan mampu.

Tabel 4.5
Ketetapan Sasaran Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah rumah bapak/Ibu minimal berlantaikan semen?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh RTS atau responden menyatakan bahwa rumahnya minimal berlantaikan semen. Berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat penerima bantuan raskin sudah memiliki perumahan yang layak huni.

Tabel 4.6
Ketetapan Sasaran Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga Bapak/Ibu memiliki lahan pertanian?	25	70
Persentase %	26,32%	73,62%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan data kusioner di atas, masyarakat yang memiliki lahan pertanian sebesar 25 orang atau 26,32% dari jumlah penerima responden. Sehingga berdasarkan hasil jawaban kusioner oleh responden diatas bahwa raskin di Kecamatan Sukarame belum tepat sasaran, karena berdasarkan keadaan masyarakat penerima raskin sebesar 26,32% masyarakatnya memiliki lahan pertanian, dan dapat digolongkan keluarga mampu sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan raskin. Karna peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu kriteria penerima program raskin adalah salah satunya tidak memiliki lahan pertanian.

- c. Tepat waktu adalah pendistribusian beras raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTSPM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali.

Tabel 4.7
Ketetapan Waktu Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah anda menerima raskin sesuai dengan jadwal?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan hasil kusioner di lapangan menunjukkan bahwa 100% masyarakat menjawab tidak. Menurut Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame bahwa waktu pendistribusian raskin di Kecamatan Sukarame

tidak pernah menentu. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat waktu belum terlaksana dengan baik, bahwasannya telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah raskin diberikan setiap bulannya.

- d. Tepat harga adalah harga beras raskin yang diberikan di setiap Kelurahan atau Daerah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.1.600/KG.

Tabel 4.8
Ketetapan Harga Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah anda membeli beras miskin (raskin) dengan harga Rp. 1.600/kg setiap bulannya?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kuisiner tahun 2018

Berdasarkan hasil kuisiner di lapangan menunjukkan bahwa 95 orang atau seluruh RTS menjawab bahwa mereka membeli beras raskin dengan harga yang sama setiap tahunnya yaitu Rp. 2000/kg. Menurut ibu Asminah salah satu penerima raskin, setiap raskin ditebus dengan harga Rp. 2000/kg sehingga sebulan raskin 15kg dibeli dengan harga Rp. 30.000, ditambah dengan biaya administrasi dengan RT sebesar Rp. 3.000 total yang harus dikeluarkan RTS setiap bulannya sebesar Rp. 33.000.

Berdasarkan kondisi tersebut bahwa indikator tepat harga raskin di Kecamatan Sukarame tidak terlaksana dengan baik, karna banyak biaya tambahan yang harus dibayar oleh rumah tangga sasaran.

- e. Tepat kualitas adalah kualitas beras raskin yang baik dan layak untuk dikonsumsi

Tabel 4.9
Ketetapan Kualitas Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah menurut anda kualitas beras miskin (raskin) layak untuk dikonsumsi?	30	65
Persentase %	31,58%	68,42%

Sumber: Data diolah dari Kuisiner tahun 2018

Berdasarkan hasil kuisiner di lapangan bahwa sebanyak 65 orang atau sebesar 68,42% RTS-PM mengatakan bahwa kualitas beras raskin masih sangat rendah. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame, Beliau mengatakan bahwa kualitas beras yang masih rendah dipengaruhi karena adanya banyaknya penumpukan beras di gudang dan juga tumpukan karung yang berisikan beras tersebut selalu di semprot pestisida untuk menghindari kualitas beras yang rusak seperti timbulnya beras yang berwarna kekuningan, dan menimbulkan dampak aroma dan rasa yang tidak enak pada beras raskin ketika dimasak.

Adapun sebagian warga menggunakannya sebagai campuran dengan beras yang berkualitas bagus pada saat di masak.¹

Hal ini mengakibatkan program beras miskin (raskin) bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan awal program tersebut diterapkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program raskin di Kecamatan Sukarame belum terlaksana dengan baik.

- f. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Tabel 4.10
Ketetapan Administrasi Program Raskin

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima raskin?	-	95
Persentase %	-	100%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan hasil kuisisioner di lapangan sebanyak 95 orang atau sebesar 100% RTS-PM mengatakan tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerimaan raskin. Berdasarkan hal tersebut bahwa dapat dikatakan indikator tepat administrasi program raskin di Kecamatan Sukarame terlaksana dengan baik, karena tidak adanya persyaratan yang harus dilengkapi oleh rumah tangga sasaran.

¹ Sudarni, Hasil Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sukarame, 23 Mei 2018

Indikator lainnya yang berhubungan dengan kondisi responden, seperti tingkat kebutuhan dasar (makanan), tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan skala perekonomian masyarakat.

Tabel 4.11
Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah keluarga anda minimal makan 2kali sehari?	95	0
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 responden atau 100% responden menjawab iya dan tidak ada responden yang menjawab tidak. Dalam hal ini responden menunjukkan bahwa keluarganya minimal makan dua kali sehari.

Tabel 4.12
Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah dalam waktu seminggu dua kali keluarga anda mengkonsumsi ikan?	95	-
Persentase %	100%	-

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 reponden menjawab iya Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden

tercukupi kebutuhan pangannya, karena mampu mengkonsumsi ikan dalam 2kali seminggu dan gizi yang didapat cukup terpenuhi.

Tabel 4.13
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah jenjang pendidikan keluarga anda minimal SMP?	70	25
Persentase %	73,68%	26,32%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 70 reponden atau 73,68% responden yang menjawab iya dan 25 responden atau 26,32% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 73,7% RTS bersekolah minimal pada jenjang SMP, yang artinya pendidikan di Kecamatan Sukarame sudah cukup baik.

Tabel 4. 14

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan tetap?	60	35
Persentase %	63,16%	36,84%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 60 reponden atau 63,16% responden yang menjawab iya dan 35 responden atau 36,84% responden yang menjawab tidak. Hal ini

menunjukkan bahwa sebesar 63,16% masyarakat penerima raskin memiliki penghasilan tetap.

Tabel 4.15
Skala Perekonomian Masyarakat

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah ada pilihan bagi anda untuk pekerjaan yang lebih baik dalam menunjang perekonomian keluarga?	35	60
Persentase %	36,84%	63,16%

Sumber: Data diolah dari Kusioner tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 35 reponden atau 36,84% responden yang menjawab iya dan 60 responden atau 63,16% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 60 RTS-PM tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan 6 (enam) indikator program raskin di atas bahwasannya program raskin di Kecamatan Sukarame dapat diartikan belum efektif. Karena adanya ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi secara penerapannya di lapangan selama 7 tahun kebelakang. Ketidak tepat sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh penulis terdapat adanya rumah tangga yang kurang mampu tidak mendapatkan manfaat beras subsidi dari

pemerintah, dan ada juga masyarakat yang terbilang mampu masih mendapatkan manfaat beras subsidi tersebut.

Karena sebagian besar penerima bantuan raskin di Kecamatan Sukarame ini masyarakat yang keadaan perekonomiannya cukup baik dalam hal ini sebagian dari mereka memiliki lahan pertanian. Masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Sukarame belum merasakan manfaat adanya program raskin ini, seperti para rumah tangga pendatang yang status ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak kelurahan atas hak mereka menerima raskin. Ada juga masyarakat yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima raskin karena tidak ada pendataan ulang dari pihak kelurahan sehingga masih diberikan beras raskin sebesar 15 kg.

Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat raskin seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif tidak semata-mata memandang anggota keluarga aparat saja, yang keadaannya sudah mampu namun ingin mendapat bantuan raskin juga dengan dalih jika tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa. Padahal raskin yang mereka peroleh tidak begitu memberikan manfaat bagi keluarga yang mampu membeli beras yang kondisinya lebih layak dikonsumsi, sehingga apabila raskin datang mereka menebus hanya untuk memberi makan ayam saja. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat beras subsidi tersebut. Selain kurangnya tepat sasaran dalam pemberian beras raskin, adanya ketidak tepatan kualitas beras yang disubsidikan oleh pemerintah dengan harga tebusan yang

sangat murah sangat berpengaruh terhadap manfaat program raskin itu sendiri terhadap masyarakat di Kecamatan Sukarame.

Merujuk pada tujuan raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Sehingga raskin di harapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tidak mampu dan dapat menekan biaya pengeluaran keluarga miskin sehingga uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat mengatakan bahwa beras yang mereka beli memiliki aroma dan rasa yang tidak enak. Bukan tanpa alasan hal ini terjadi, itu disebabkan karena adanya proses penyemprotan karung beras yang dilakukan digudang penyimpanan sebelum beras raskin di distribusikan sampai ke tangan masyarakat untuk menghindari adanya beras yang rusak dan berwarna kekuningan. Meskipun demikian beras raskin tetap layak untuk dikonsumsi namun sebagian masyarakat menyiasatinya dengan cara menggunakannya sebagai campuran ketika mereka memasak nasi, seharusnya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dalam membeli beras, namun mau tidak mau masyarakat mengeluarkan uang lagi untuk membeli beras dengan kualitas bagus. Seharusnya uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk keperluan lain, tetapi mereka harus menyisihkan uang untuk membeli beras lagi.

Selain sebagian masyarakat mendapatkan beras raskin dengan kualitas yang kurang baik, ketidak tepatan waktu dalam pembagian beras membuat masyarakat enggan untuk menebus beras raskin walaupun dengan harga murah. Kualitas yang kurang baik juga yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk menebus beras raskin tersebut. Meskipun kualitas raskin dirasa kurang layak namun masih ada sebagian warga yang merasa sangat membutuhkan walaupun hanya digunakan sebagai campuran setidaknya mereka dapat menghemat uang dalam membeli beras. Indikator tepat harga di Kecamatan Sukarame juga belum terlaksana dengan baik.

Seluruh masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukarame mengatakan harga beras yang dibeli sebesar Rp. 2.000/kg tidak ada perbedaan dalam menetapkan harga beras dari bulan-kebulan. Dalam pendistribusian raskin juga tidak perlu mengumpulkan berkas-berkas lagi. Dalam pendistribusian beras raskin seluruh masyarakat yang menerima jumlah raskin sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 10-15 kg /per bulan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang dianggap mampu masih terdata sebagai rumah tangga penerima manfaat raskin.

Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin di Kecamatan Sukarame belum memenuhi 6 (enam) indikator tercapainya program raskin. Karena hanya 2 (dua) indikator saja yang sudah tercapai dengan baik yaitu indikator ketepatan jumlah dan ketepatan administrasi program raskin. Untuk tercapainya kesuksesan suatu program

raskin dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik. Pengawasan, pelaksanaan program raskin diawasi oleh pengawas gabungan mulai dari pendataan RTS-PM sampai penyaluran Raskin ke RTS-PM yang terdiri dari pelaksana setiap Kelurahan serta pelaksana Kecamatan Sukarame.²

Program Raskin yang diberikan kepada masyarakat miskin oleh pemerintah, dinilai hanya akan menciptakan sindrom ketergantungan bagi masyarakat. Program Raskin lebih cocok diberikan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya, misalnya orang cacat dan jompo terlantar. Pemerintah sebaiknya memberi bantuan kepada masyarakat miskin berupa program pemberdayaan masyarakat miskin, misalnya : (1) program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja / usaha melalui pendidikan dan latihan-latihan kerja; (2) perluasan jaringan usaha (*networking*); (3) informasi pasar; (4) bantuan modal kerja / usaha. Dengan program pemberdayaan masyarakat miskin ini, maka diharapkan mereka menjadi produktif.

B. Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling

² Sudarni, Hasil Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sukarame, 23 Mei 2018

bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni;

a. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukarame termasuk tidak tepat sasaran dari pemberian manfaat beras subsidi, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat/rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan manfaat beras subsidi. Jadi implementasi program raskin di Kecamatan Sukarame belum memenuhi keadilan.

b. Pertanggungjawaban

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukarame masih ada saja pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan program ini dan dalam hal ini banyak pihak yang tidak amanah dalam tugasnya, karena masih ada saja yang memberikan manfaat beras subsidi kepada orang yang tidak tepat, seperti keluarga pihak yang mengelola, pihak yang mengelola, kerabat, bahkan masyarakat yang dipandang atau disegani

mendapatkan manfaat berassubsidi. Jadi, masih adanya bentuk tidak tanggung jawab dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukarame, sehingga tidak dapat terealisasi dengan baik, hanya dipandang program pemerintah yang sia-sia/cuma-cuma.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kasi Pemberdayaan Kecamatan Sukarame bahwa dalam pendistribusian beras raskin di setiap kelurahan penerima bantuan raskin tidak pernah adanya pengawasan dari pihak kecamatan, sehingga program raskin lepas dari pertanggung jawaban pemerintah, berdasarkan hal tersebut bahwa permasalahan program raskin yang terjadi di lapangan tidak dapat terselesaikan dengan jalan keluar yang baik, karena sudah lepas pertanggung jawaban aparat pemerintah dan tidak ada komunikasi yang baik antara pihak Kecamatan dan pihak Kelurahan.

c. *Takaful* (Jaminan Sosial),

Adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak

hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasannya efektivitas program raskin di Kecamatan Sukarame dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil dan tanggung jawab, karena belum adanya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya suatu hubungan yang baik.

2. Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukarame menurut Ekonomi Islam

Untuk menganalisis pendistribusian subsidi beras (Raskin) di Kecamatan Sukarame, penulis hendak menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem Ekonomi Islam, yaitu:

a. Larangan riba, dan garar

Kata riba dalam al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam hal ini dilihat dari kenyataan bahwa masyarakat yang menerima beras subsidi Raskin di Kecamatan Sukarame tidak termasuk golongan riba, karena mereka saling menukar uang dan barang, yaitu yang sudah dijelaskan pada

ulasan diatas masyarakat membayar uang sebesar Rp 34.000/15kg sebelum datangnya beras subsidi Raskin. Dan disetorkan pada ketua RT masing – masing, setelah itu masyarakat mengambil haknya yang sudah di bayar di muka. Namun begitupun dengan larangan *gharar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai ketidakpastian dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak lain pasti mendapat kerugian atau dengan kata lain, bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.³

Masyarakat di Kecamatan Sukarame jelas ada yang diuntungkan dan dirugikan dalam hal pembagian beras subsidi Raskin, karena warga yang mampu mendapat keuntungan dan sedang warga yang tidak mampu atau RTS mendapat kerugian. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 77.

harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktik pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Sukarame dengan sistem bagi rata telah terjadi pengambilan harta dengan cara yang tidak sah yaitu dengan mengambil harta yang seharusnya menjadi hak orang miskin. Karena meskipun masyarakat desa menerima beras Raskin melalui cara yang sah yaitu jual beli, namun pada dasarnya dalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur kerelaan dari masyarakat miskin. Oleh karena itu, praktek tersebut tidak sesuai dalam Sistem Ekonomi Islam.

b. Keadilan dalam distribusi

Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *masalahah*. Dengan demikian, dalam persoalan distribusi bagi rata beras Raskin di Kecamatan Sukarame tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam pembagian Raskin secara merata terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin itu sendiri dimana semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin dapat menikmatinya. Karena sesungguhnya yang disebut

keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (Q.S. Az-Zariat (51); 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan

horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda pada dasarnya milik Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta benda tersebut.⁴ Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Kecamatan Sukarame yang tidak miskin termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut kebutuhan dasar dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya.

d. Larangan Menumpuk Harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat

⁴ *Ibid*, h. 85

mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat. Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat. Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat kelurahan/kecamatan saja atau segelintir orang saja yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan gejolak sosial. Harga tebus beras Raskin juga telah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah yang tercantum dalam Pedoman Umum Raskin sehingga tidak terjadi kegiatan monopoli oleh sekelompok orang saja yang akan mengakibatkan pematokan harga yang tinggi. Namun, apabila praktek pendistribusian secara merata ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Kecamatan Sukarame) adalah sebagai berikut:

1. Program Raskin di Kecamatan Sukarame dari tahun 2010-2016 belum efektif. Program raskin di Kecamatan Sukarame dikatakan belum efektif karena belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan raskin, dimana indikator 6T tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program raskin di Kecamatan Sukarame.

Dari indikator 6T yaitu: tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, bahwa pada kenyataan di lapangan program raskin di Kecamatan Sukarame hanya memenuhi 2 (dua) indikator saja yaitu indikator tepat jumlah dan tepat administrasi.

2. Dalam efektivitas program raskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukarame menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu:

Berdasarkan praktik di lapangan program raskin di Kecamatan Sukarame dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam hanya 1 (satu) yang telah terpenuhi yaitu Takaful (Jaminan sosial) sebagai bentuk jaminan sosial pemerintah

untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat. Efektivitas program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Berdasarkan Efektivitas program raskin di Kecamatan Sukarame, bahwa program ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan *Ad-Dharuriyat* saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Efektivitas beras miskin (raskin) yang akan diberikan kepada masyarakat;
 - a. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan dari pihak Kecamatan agar program raskin dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran.
 - b. Sesuai dengan indikator 6T yang telah ditetapkan. Masyarakat; diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk bersikap aktif dalam melakukan kontrol dari setiap kebijakan penguasa yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan mengurus urusan umat. Dimana, hendaknya bersikap kritis bila ditemukan adanya kebijakan tersebut yang

bertentangan dengan konsep Islam, seperti dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu

- c. Pihak Kecamatan diharapkan meninjau kembali harga beras yang harus ditebus oleh masyarakat, agar sesuai dengan ketentuan tepat harga.
 - d. Pihak Bulog diharapkan agar melihat kembali beras yang akan dibagikan ke masyarakat penerima raskin, agar beras yang dibagikan layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan ketentuan tepat kualitas.
 - e. Pihak Pemerintah diharapkan mengupayakan pendistribusian raskin di Kecamatan Sukarame agar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian dan sesuai dengan indikator tepat waktu.
2. Pihak Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai Ekonomi Islamnya yang terdiri dari keadilan, tanggung jawab, serta takaful. Agar terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui program raskin ini.
 3. Untuk penelitian lanjutan, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih tinggi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Jakarta: Syamil Cipta Media. 2001. Cet. Ke. 5
- Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah*. Jakarta: Izzah. 2001.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Hambatan bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Husain at-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan, (terj) oleh M. Irfan Syofwani*. Yogyakarta: Magistra Insani Press. 2004.
- Idri, dan Titik Triwulan Tutik. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2008.
- Kaisran Moh. *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Malang: UIN Maliki. 2010.
- Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (Petunujuk Teksis Operasional), Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Maeswara, Garda. *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta : Narasi. 2009.
- Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

- Moersaleh dan Musanef. *Pedoman Pembuatan Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung. 2000.
- Ningrat, Koentjara. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Noor , Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2010.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I terjemah Soeroyo*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf. 2000.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Rofiq, Aunur. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Republika, 2014.
- Sam F. Poli. *Memperdayakan kaum Miskin*. Yogyakarta: 2005.
- Setiawan M Nur Kholis. *Pribumisasi al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kaukaba. 2012
- Simamora NS Roymond H/ *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2008
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R/D*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Ulum, Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press. 2004
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Wargadinata, Wildana. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang : UIN Malang Press. 2011.

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Jurnal

Asfriqi Machfiro. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) di Kota oalu*. E-Jurnal Katalogis ISSN: 2302-2019. Vol. 3 Nomor. 2. 2015

Arief Ibnu Sazmie, *“Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Maharatu Kota Pekan Baru”*, Jom Fisip Vol. 4 No. 2. Oktober 2017

Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, *“Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)”* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12.

Biatna Dulbert Tampubolon *“Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan Sni 19-9001-2001”*. Jurnal Standardisasi Vol. 9 No. 3 Tahun 2007

Mukhlisin Muzarie, *“Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama”*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010.

Sujianto, Ernawati, Hasim As’ari, Mayarni, *“Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat”*Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012,

Sudarsana, *“Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Imdonesia”*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, ISSN: 0215-9635 Vol 21. No. 2 Tahun 2009

Siti Ulparia Lubis, Tavi Supriana Dan Emalisa, *“Respon Masyarakat Penerima Raskin Terhadap Program Beras Bagi Keluarga Miskin (Raskin) Studi Kasus : Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan”*, Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan

Web

<https://bandarlampungkota.bps.go.id/> (Diakses pada 28 Maret 2018, pukul 15.00 WIB)

https://bandarlampungkota.bps.go.id/Sukarame_dalam_Angka_2009-2017/ (Diakses pada 28 Januari 2018, 12.00 WIB)

[http://www.bps.go.id/Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2016/](http://www.bps.go.id/Perhitungan_dan_Analisis_Kemiskinan_Makro_Indonesia_Tahun_2016/) (Diakses pada Jumat, 27 April 2018 pukul 15.00 WIB)

<http://bulog.co.id/sekilas-raskin/>, page 1 diakses tanggal 19 Januari 2018

<http://www.tnp2k.go.id/id>, “Beras Raskin”,h.1, diakses 27 Januari 2018

<http://www.tnp2k.go.id/id/program-penghentas-kemiskinan-indonesia/>diakses 27 April 2018

<http://www.tnp2k.go.id/id/program-penghentas-kemiskinan-indonesia/>diakses pada hari Jumat 27 April 2018

